



Cirebon Katon

akil Rakyat

Lestarikan Budaya Cirebon



Makna Merdeka



Selamat datang bulan Agustus. Begitulah kiranya, sapaan untuk bulan yang senantiasa dinantikan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

Agustus, selalu memberikan momen untuk mengingatkan kita semua tentang nikmat Tuhan yang agung berupa kemerdekaan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajahan.

Masing-masing dari kita, sudah paham arti kata merdeka secara bahasa, yaitu bebas, tidak terikat atau tergantung kepada pihak lain. Namun, tentu setiap insan memiliki perspektif kemerdekaannya masing-masing.

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, mengusung tema "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju", sebagai momentum yang tepat untuk semakin menguatkan persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa. Melalui tema ini, ada makna mengenai cerminan semangat dalam pembangunan

Indonesia, yang terus maju.

Tak terkecuali bagi kami yang terus bergelora dalam spirit kemerdekaan. Memberikan sajian jurnalistik bagi pembaca setia.

Bagi kami, kemerdekaan pers adalah saat Pemerintah Indonesia berhasil mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kehadiran payung hukum tersebut, semakin mengukuhkan peranan pers yang sangat penting dalam memberikan informasi, mengedukasi hingga kontrol sosial secara objektif dan faktual.

Melalui momentum kemerdekaan, kami segenap jajaran redaksi majalah Cirebon Katon serta Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Seiring dengan itu kami sajikan bacaan dan informasi bagi segenap pembaca budiman dengan tema kebudayaan dan kesenian Cirebon. Selamat membaca Cirebon Katon. Merdeka!

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Hj Eriati
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

H. Sofwan, S.T
(Ketua Komisi 1)

Pandi, S.E
(Ketua Komisi 2)

Anton Maulana, S.T, M.M
(Ketua Komisi 3)

Aan Setiawan, S.Si
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Sulianingrat
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

Nisa Afidah, SH
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Dra. Puti Amanah Sari
(Pj Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Dra. Puti Amanah Sari
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Supardi • Kustano • Riyan • Amir

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Susah Payah Rawat Budaya

6 | Perpustakaan Daerah

Minim Inovasi, Sepi Pengunjung



14 | KILAS

Teguh: Tak Cukup Sebatas Perawatan Seremonial



18 | PUBLIKA

Mohon Awasi Galian Tambang



22 | LENSA

Pengrajin Barongsai
Tak Pernah Sepi Pemesan



24 | PROFIL

Hermawan, M.Pd
Sabet Juara Adiwiyata dan Inisiasi Aplikasi Absensi

28 | DINAMIKA

Gali Kebijakan Anggaran Komisi Informasi

30 | Komisi II: Pemkab Harus Optimalikan PAD Sektor BUMD

32 | Komisi IV Ingatkan Dinkes Segera Distribusi Antropometri

34 | Komisi III: Segera Selesaikan Pembangunan Alun-Alun Pataraksa



36 | POTENSI

Situs Keraton Gebang
Butuh Sentuhan Agar Tak Ditinggal Wisatawan



38 | DESA

Guwa Kidul
Pelayanan Cepat Berkat Website

Susah Payah Rawat Budaya

Dari sepuluh objek kebudayaan sebagaimana amanat Undang-Undang, hanya sebagian yang masih eksis dan terawat. Selebihnya kesulitan bertahan. Mengapa terjadi?



Menjelang sore, Toni Aldiansah (12) terlihat asik bermain egrang seorang diri di halaman rumahnya. Permainan tradisional berbahan dasar bambu itu ia buat dengan tangannya sendiri. Di kota besar, hampir sulit menemukan anak kecil yang memainkan permainan tradisional.

Laki-laki yang saat ini duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu, dikenal karena kemampuannya membuat kerajinan tangan. Di tempat lahirannya, Desa Dompnyong Kulon, Kecamatan Gebang, Toni biasa menghabiskan harinya bermain di halaman rumah.

Di saat teman-teman sebayanya sibuk bermain *handpone*, Toni lebih memilih bermain dengan mainan buatannya. Tak hanya egrang, terkadang Toni juga bermain kelereng dan gasing bersama beberapa temannya.

Apa yang dilakukan Toni, merupakan permainan rakyat yang sudah jarang dimainkan anak-anak.

Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, ada 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sepuluh OPK tersebut, antara lain: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa dan ritus.

Meski demikian, dari total objek kebudayaan, hanya sebagian yang masih bertahan dan terawat. Selebihnya sudah sulit ditemukan. Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Cirebon (DKKC) Sulama Hadi mengaku prihatin melihat kondisi budaya saat ini.

Dia menilai, pemerintah daerah belum serius mengelola kebudayaan Cirebon. Salah satu alasannya mengenai validasi data kebudayaan dan seniman di tingkat desa.



“Saya sudah turun ke lapangan, hampir semua desa tidak memiliki data jumlah seniman di desanya. Saya miris mendengarnya, kami selaku seniman merasa tidak diperdulikan,” keluhnya.

Selain itu, ia juga mengaku sering mendengar keluhan dari anggotanya terkait sanggar kesenian mereka yang sepi *job*. Ia khawatir

kondisi seperti itu akan membuat kesenian yang menjadi salah satu kebudayaan Kabupaten Cirebon bisa tenggelam dan hilang.

Keprihatinan Sulama juga semakin meningkat, saat melihat pemerintah daerah justru mengundang kesenian lain di luar Cirebon saat menggelar kegiatan.

“Saya beberapa kali melihat

dari pemerintah daerah sendiri belum memberdayakan kami selaku pelaku seniman di Kabupaten Cirebon. Hal itu terbukti saat mereka membuat acara malah mengundang budaya dari luar Cirebon. Itu kan miris,” ungkap Sulama.

Sulama menilai, hal tersebut merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam pelestarian budaya. Padahal, selain sebagai pemangku kebijakan mereka juga merupakan figur publik yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

Ia pun menegaskan, melestarikan budaya bukan hanya membutuhkan regulasi tapi juga perlu diikuti realisasi yang berlaku bukan hanya untuk masyarakat bawah, tapi juga seluruh *stake holder* pemerintahan.

“Lestarinya sebuah budaya bergantung pada sikap pemangku kebijakan bagaimana memberdayakan seniman. Karena dia juga merupakan figur publik yang bisa dicontoh oleh masyarakat,” tegas Sulama.





Disbudpar Kabupaten Cirebon pun tak menampik, bila belum semua objek budaya Cirebon telah terawat dan teruwat. “Kita akui Disbudpar tidak bisa untuk mengcover semuanya. Sebagian bahkan hanya dapat ditemui saat perayaan hari tertentu. Bahkan untuk olahraga tradisional dan permainan rakyat sudah jarang ditemukan,” ungkap Kabid Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Cirebon Kartika Sari.

Kartika membeberkan, bila saat ini Disbudpar sedang fokus pada perawatan bahasa, seni, situs dan adat istiadat. Palsanya Kabupaten Cirebon memiliki banyak situs atau tempat bersejarah yang belum dikelola dan masih berstatus objek diduga cagar budaya (ODCB).

“Data terakhir yang kami dapat sejak Juli lalu ada sekitar 545 tempat yang masih berstatus ODCB. Bahkan jumlah tersebut bisa bertambah sampai ribuan,” bebarnya.

Tak heran, banyak desa yang mengajukan ke Disbudpar agar segera dilakukan penelitian, supaya situs yang semula berstatus ODCB, berubah menjadi CB atau cagar budaya. Sejauh ini baru pendopo bupati yang telah masuk sebagai cagar budaya.

Namun, Disbudpar pun tak bisa berbuat banyak karena penelitian memerlukan proses yang panjang dan memerlukan tim ahli cagar budaya. Setidaknya melibatkan 5 tim meliputi ahli antropologi, sejarah, teolog, hukum, dan arsitek.

Kartika juga mengakui deretan kesenian Cirebon seperti, wayang, tari topeng, sintren, angklung, burok kesulitan mencari generasi. Meski jumlah sanggar berkisar ratusan, namun tak semuanya aktif. “Hanya beberapa saja yang aktif. Selebihnya mati,” jelas Kartika. Sementara menurut data Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon dari jumlah

560 sanggar hanya 60 yang masih aktif melakukan kegiatan.

Kartika menyebutkan, kesenian yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak benda (WBTb) Indonesia ialah tari topeng, sintren, lukis kaca Cirebon, gembyung, tarling, getak winangun, angklung bungko, dan gong renteng.

Tak dipungkiri, jumlah situs yang masih berstatus ODCB dan kesenian yang belum ditetapkan sebagai WBTb sekaligus 500 sanggar yang tidak aktif menjadi pekerjaan rumah bagi Disbudpar Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah daerah wajib melakukan pemeliharaan yang bertujuan agar objek perawatan kebudayaan (OPK) tidak rusak, hilang, atau musnah. Di antaranya dengan cara menjaga nilai keluhuruan, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan. •par

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Teguh: Tak Cukup Sebatas Perawatan Seremonial

Perawatan budaya Cirebon diakui belum dilakukan secara optimal. Teguh menilai, baru sebatas seremonial dan pembinaan. Apa sarannya?



Kemajuan suatu daerah dapat terlihat dari bagaimana mengelola dan merawat budaya. Sementara, terjaganya sebuah budaya bisa dinilai melalui tingkat kesejahteraan pelaku budayanya. Setidaknya itulah yang diyakini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka, SH.

Teguh mengatakan, bahwa Cirebon lahir dan besar dari budaya. Peninggalan kebudayaan yang berlimpah hingga saat ini sangat terasa. “Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa Kabupaten Cirebon itu lahir dari budaya yang kaya,” kata Teguh.

Oleh karenanya, sudah seharusnya pemerintah daerah bisa mengoptimalkan potensi budaya dan

menjaganya tetap terawat.

Menjaga budaya salah satunya dengan memastikan kesejahteraan pelaku budaya dan kesenian. Namun politisi Golkar itu menilai, sejauh ini keberadaan mereka sebagai tonggak perawat budaya cukup memprihatinkan.

“Jika dilihat, di lapangan masih banyak budayawan dan seniman yang merasa tidak diperhatikan dan diberdayakan oleh pemerintah daerah. Baru sebatas seremonial pas kegiatan,” jelasnya.

Ia pun menyayangkan peran pemerintah daerah yang tak serius mengelola dan merawat budaya. Padahal bila dapat dioptimalkan, budaya merupakan lumbung pendapatan daerah.

“Sebetulnya pemerintah daerah akan diuntung-



kan, karena potensi ini akan menjadi peningkatan anggaran daerah juga. Kita ambil contoh di Bali, orang-orang pergi ke sana selain karena pemandangannya juga alasan karena budaya,” ungkap Teguh.

Alumni Universitas Trisakti itu pun menjelaskan, perlunya peraturan daerah sebagai turunan Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan. “Saat ini DPRD tengah menggondok raperdanya,” jelasnya.

Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Cirebon Kartika Sari mengakui, pengelolaan budaya dan kesenian Cirebon masih tahap pengembangan.

“Memang masih banyak PR, tapi kami terus upayakan,” kata Kartika.

Sejauh ini, Disbudpar telah melakukan pengembangan kebudayaan dan kesenian agar tidak tenggelam zaman melalui berbagai program pembinaan. Menurutnya, di tengah zaman modern kesenian wayang misalnya, agar tak ditinggal peminatn-

ya, harus berinovasi. Mengubah cara lama mengenalkan wayang.

Disbudpar mengklaim, kesenian wayang sudah menjadi ekstrakurikuler di beberapa sekolah. Upaya tersebut agar keberadaan wayang dikenal dan digandrungi anak muda.

“Karena kalau wayang sudah masuk sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) sehingga sudah bisa kita upayakan menjadi ekstrakurikuler,” ungkap Kartika.

Di tahun 2023, Disbudpar pun mencanangkan penambahan warisan budaya agar terdaftar dalam WBTb.

Selama ini, sudah banyak desa yang mengajukan kajian terhadap warisan kebudayaan di wilayahnya masing-masing. Namun belum dapat dilanjutkan karena memerlukan waktu dan anggaran yang cukup.

Dalam setahun, Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya mampu mengajukan 3 hingga 4 WBTb. Sementara jumlah warisan budaya yang belum memiliki WBTb masih banyak.

“Jika desa melakukan kajian sendiri maka pengajuan WBTb juga bisa lebih cepat. Misalkan setiap desa ada 1, paling pembiayaan sekitar Rp 20 juta,” tuturnya.

Selain itu, Disbudpar juga tengah meningkatkan kembali eksistensi kesenian yang rawan hilang. Melalui beberapa kegiatan, Disbudpar mengundang kesenian tersebut untuk tampil. Dengan begitu, sanggar kesenian menjadi hidup.

“Misalkan jika kita membuat kegiatan di suatu daerah, kita akan munculkan kesenian di daerah tersebut,” ungkap Kartika.

Kartika menerangkan, bila pemberdayaan kebudayaan dan kesenian tak cukup terhadap objeknya, melainkan juga para pelakunya.

Program pemberdayaan budayawan dan seniman baru melalui kegiatan pentas seni sekaligus pembinaan melalui Dewan Kebudayaan Kabupaten Cirebon (DKKC). “Kami memiliki grup *online* bersama pelaku kesenian di Kabupaten Cirebon. Kami selalu *sharing* mengenai eksistensi budaya saat ini,” terangnya.

Meski demikian, Kartika mengakui, Disbudpar belum optimal dalam merawat kebudayaan Cirebon karena keterbatasan. Ia pun menyambut baik rencana pembentukan peraturan daerah mengenai kebudayaan. Kartika berharap kehadiran perda, semakin menghidupkan budaya Cirebon sekaligus meningkatkan kesejahteraan seniman.

“Kehadiran Perda juga akan semakin mempertegas agar seluruh SKPD di Kabupaten Cirebon wajib menghadirkan budaya lokal saat perayaan tertentu sehingga berkomitmen memberdayakan seluruh seniman Cirebon,” pungkas Kartika. •par

Perda Kebudayaan Segera Disahkan

Kehadiran Perda Kebudayaan akan optimalkan potensi budaya sekaligus kepastian kesejahteraan budayawan dan masyarakat. Apa manfaat lainnya?



Ki Amo tak pernah menyangka, bila tahun 2017 adalah waktu ia berhenti menjadi seorang dalang. Pemilik nama lengkap Amo Wijaya, merupakan seniman wayang cepak asal Desa Karangtengah, Kecamatan Karangsembung. Amo terpaksa menutup sanggar wayangnya karena sudah tak lagi ada peminat.

Wayang Cepak Langgeng Kusuma miliknya sudah bertahun-tahun tak lagi tampil. Menghibur masyarakat. Padahal dulu, kesenian ini sempat mengalami masa keemasannya. "Saya jadi dalang sejak 1968. Saya pernah tampil diundang oleh Presiden Soeharto di Taman Ismail Marzuki," ungkap Ki Amo.

Namun, rupanya zaman sudah berubah. Wayang cepak tak lagi mendapat hati di masyarakat. Terakhir kali, Ki Amo tampil dalam perayaan 1 Muharam di Keraton.

"Sudah setengah abad saya menjadi dalang. Jika sekarang diminta untuk mendalang saya tidak tahu masih kuat atau tidak. Dulu saya rutin main di Keraton Kacirebonan setiap 1 Muharam," jelasnya.

Wayang Cepak merupakan salah satu di antara kesenian khas Cirebon yang belum diperhatikan serius Pemerintah Kabupaten Cirebon. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka mengatakan, pelestarian budaya dan kesenian di Kabupaten Cirebon belum terkelola dengan baik. Hal itu dibuktikan melalui keresahan sejumlah pelaku budaya dan seniman.

Oleh karenanya, Teguh menjelaskan, Kabupaten Cirebon perlu memiliki payung hukum untuk menjaga kebudayaan, melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

"Kami merasa perlu ada penguatan dan pemajuan terkait nilai-nilai kebudayaan, agar budaya di Kabupaten Cirebon tetap terjaga. Maka kami menginisiasi pembentukan Perda tersebut," jelas Teguh.

Dia menilai, tak optimalnya perawatan budaya Cirebon disebabkan belum adanya payung hukum yang pasti pada sektor pelestarian kebudayaan. Tak hanya karena legislator, sebagai warga asli Cirebon, Teguh merasa punya tanggung jawab menjaga kebudayaan.

Adanya Perda ini, akan menjadi solusi sekaligus jawaban bagi budayawan dan seniman yang merasa tidak diperhatikan. Perda mengatur bukan hanya untuk menjaga kebudayaan dan kesenian saja, melainkan kesejahteraan pelaku budaya dan kesenian.

"Perda juga wajib menjamin kesejahteraan budayawan. Mereka perlu sentuhan pemerintah, agar tetap bisa melestarikan budaya, karena mereka adalah pelaku yang paham betul mengenai budaya," jelasnya.

Penguatan dan pemajuan budaya dirancang agar kebudayaan bukan hanya tetap terjaga, melainkan juga bisa berkembang. Sehingga kebudayaan akan tetap lestarian dalam situasi apapun.

Teguh menerangkan, tanggung jawab menjaga kebudayaan bukan hanya milik budayawan tapi pemerintahan seluruh tingkat. Maka, Perda juga akan mengatur itu. Minimal desa bisa membantu pendataan jumlah kebudayaan dan kesenian di wilayahnya.

Dia menyadari, perda tidak mengatur secara teknis. Namun merupakan langkah awal untuk membentuk perbup.

"Poin penguatan dan pemajuan itu dari beberapa macam aspek, termasuk keberpihakan



anggaran. Memang perda tidak mengatur secara teknis, nanti setelah perda ada maka perbupnya akan keluar. Di sanalah akan dibahas sampai ke teknis," terang Teguh.

Sejauh ini, perencanaan pembentukan Perda Kebudayaan sudah beberapa kali dibahas dengan Disbudpar. Kehadiran Perda tersebut diharapkan agar Pemkab Cirebon konsentrasi dalam merawat budaya.

"Pembahasan sudah dilakukan sekitar 3 sampai 4 kali. Kemarin juga kami sudah melakukan studi komparasi dengan beberapa daerah, dan saat ini masih *on progres*," tambahnya.

Sekretaris Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon Khanafi menuturkan, melalui Perda penguatan dan pemajuan kebudayaan, DPRD mendorong pemerintah daerah agar lebih peduli pada kebudayaan dan kesenian Cirebon.

"Melalui Perda, DPRD mendorong agar ada penguatan

dari pemerintah daerah. Salah satu caranya melalui pendataan budaya dan kesenian sekaligus pemberdayaan terhadap budayawan dan seniman," tuturnya.

Khanafi menargetkan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan akan secepatnya disahkan, sehingga pemerintah daerah bisa segera menyusun Perbup.

"Ditargetkan, Perda itu akan selesai dalam waktu 2 bulan ke depan. Itu pun tergantung respon pemerintah daerah. Selama ini masih dalam pembahasan bersama SKPD," jelasnya.

Khanafi menegaskan, Perda tersebut merupakan inisiatif DPRD. Sebagai bentuk kepedulian dan merasa yakin jika kebudayaan bisa memberikan kesejahteraan pada pelaku budaya dan masyarakat banyak.

"Perda ini inisiatif kami dari DPRD, karena kami peduli dan yakin bahwa Budaya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," tegas Khanafi. •par

Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon: Kami Ingin Pelestarian Sejak Desa

Sulama mengajak Pemkab Cirebon bersinergi dengan para budayawan dan seniman menginisiasi program perawatan budaya. Apa langkahnya?



Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon (DKKC) Sulama Hadi mengatakan, ada 3 pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Pemkab Cirebon untuk merawat budaya Cirebon.

Pertama, validasi data kesenian dan kebudayaan sejak tingkat desa. Ia menilai hal itu menjadi penting, untuk memudahkan pemerintah daerah melakukan pembinaan.

"Kemarin saya sudah ke 40 kecamatan, tapi banyak dari mereka tidak memiliki data jumlah kesenian dan kebudayaan di setiap desa. Kami ingin pelestarian dilakukan sejak dari desa," kata Sulama.

Laki-laki yang beralamat di Desa Kertasura itu menyampaikan, banyak sanggar kesenian sulit berkembang karena tidak tahu data kesenian.

Hingga kini, Sulama mengungkapkan, pemerin-

tah daerah tidak memiliki data valid jumlah kesenian dan seniman. Dan merupakan bentuk ketidakseriusan mengelola dan merawat kebudayaan.

Ia pun meminta, tugas tersebut bukan hanya dilakukan Disbudpar, namun juga seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terutama DPMD. Pastikan agar menghimbau pemerintah desa membantu pendataan jumlah kesenian dan seniman di setiap desa.

Selain itu, Sulama juga berharap DPMD bisa membagi anggaran dari dana desa untuk tahun 2024 sebagai upaya pelestarian budaya sejak tingkat desa.

"Hal ini sudah kami sampaikan ke Disbudpar dan DPMD. Saya mengusulkan anggaran 5% dari dana desa atau dari kecamatan," ujar Sulama.

Sejauh ini, Sulama menilai belum ada anggaran khusus dari desa mengenai program kebudayaan.



Padahal perawatan budaya yang paling konkret dilakukan sejak dari tingkat desa. "Dan kalau itu terjadi tentu akan membentuk kemandirian desa," jelasnya.

Kedua, Sulama mengungkapkan kesenian dan budaya lokal mesti dikenalkan ke anak-anak melalui lembaga pendidikan dengan efektif. Hal ini dilakukan untuk menjaga regenerasi agar tetap berjalan dengan baik.

"Saya pernah ngobrol dengan beberapa siswa SMP saat perayaan HUT RI ke 78 kemarin, mereka mahir *karawitan*, tapi rupanya dia diajari oleh guru

yang lulusan Jawa Tengah. Ini berarti bahasa yang mereka pelajari bukan murni bahasa Cirebon," ungkapnya.

Lalu, kondisi ketiga yang tak kalah penting. Sulama menuturkan telah banyak menerima keluhan dari anggotanya di DKKC. Ia begitu menyayangkan ketika pemerintah daerah justru mengundang kesenian lain di acara mereka.

Hal itu membuat Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon geram. Dia menilai pemangku kebijakan merupakan publik figur bagi masyarakat, maka sudah

seharusnya mampu memberi contoh yang lebih pantas.

"Anggota DKKC itu sekitar 800, dan hampir semuanya mengeluh pada saya. Tentunya saya juga merasa kecewa. Mereka publik figur, maka harus memberi contoh pada masyarakat agar mau melestarikan budaya lokal," ucap Sulama.

Sulama merasa prihatin terhadap seniman yang terpaksa menutup sanggar atau berhenti. Salah satunya Ki Etom. Dalang berusia 74 tahun asal Astanajapura berencana menjual satu peti wayang cepak miliknya, karena tak lagi berguna.

"Dia mau jual wayang cepak karena sudah lama sekali tidak tampil. Ini kan miris, dalang wayang cepak tinggal sedikit. Dan ini harus jadi perhatian serius," terangnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan pemerintah wajib memelihara kesenian dan kebudayaan. Ia pun berharap, Pemkab Cirebon mulai serius merawat kebudayaan.

Sulama mengajak agar Pemkab Cirebon bersinergi dengan para budayawan dan seniman menginisiasi program inovatif.

"Setiap kali ada momen saya selalu katakan, pemerintah dan budayawan harus bersinergi melestarikan kebudayaan dan kesenian Cirebon," kata Sulama.

Melalui kerjasama antara budayawan dan pemerintah, akan membuat budaya dan kesenian bisa terkelola dengan baik. "Jika kita saling bersinergi saya yakin kebudayaan di Kabupaten Cirebon akan tetap lestari. Jika perangkat daerah sudah mencontohkan merawat budaya dibarengi dengan kebijakan, maka masyarakat juga akan mengikuti," tandas Sulama. •par

DPRD Usulkan Raperda Layak Anak

DPRD Kabupaten Cirebon mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). Usulan tersebut bertujuan agar masalah kekerasan terhadap anak dapat diantisipasi dengan baik. Sehingga kedepan anak mendapat hak perlindungan dan pembelaan yang sesuai aturan hukum.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan

Daerah (Bapemperda) DPRD, H Hanafi SH menjelaskan, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keluarnya Raperda KLA. Salah satunya adalah hak kelangsungan hidup, untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi.

Politikus Golkar tersebut berharap, raperda segera dilakukan pembahasan Sebagai bentuk komitmen melindungi, dan mendukung kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Cirebon.

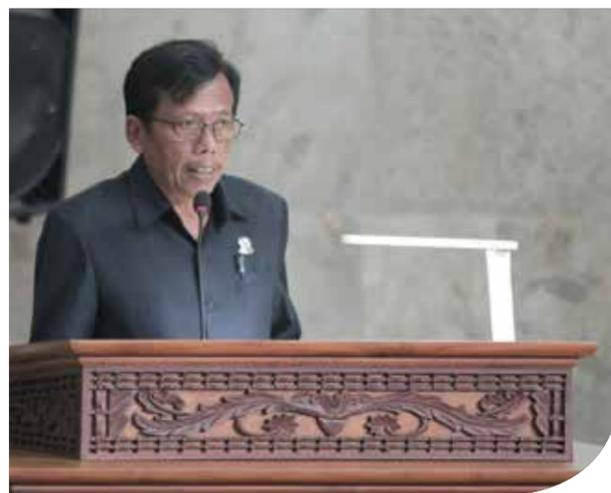


foto: foto: amih/dk

Setujui Rancangan KUA PPAS 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon kembali menggelar rapat paripurna yang beragendakan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024.

Dalam rapat yang digelar pada 9 Agustus tersebut, DPRD bersama Bupati Cirebon, menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah

(RAPBD) tahun 2024 senilai Rp 3,8 triliun.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi mengatakan, rangkaian pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun 2024 telah melewati beberapa tahapan yang melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kita telah sepakati RAPBD 2024 naik dari tahun 2023 yang semula Rp 3,6 triliun," ujar Luthfi.



Perayaan HUT RI ke-78 Semangat Persatuan Songsong Pesta Demokrasi

Pada peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-78, jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menggelar berbagai kegiatan dan lomba. Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon pun tampak hadir mengikutinya.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi berpesan pentingnya menjaga semangat, dalam berkontribusi dan bekerja untuk membangun Kabupaten Cirebon lebih baik.

Terlebih di tahun 2023 yang merupakan tahun politik menjelang Pemilu 2024. Luthfi mengatakan, agar masyarakat Kabupaten Cirebon tidak mudah terpecah belah karena perbedaan pilihan politik. Ia pun meminta semua turut memastikan hajat politik pada Februari 2024 mendatang berjalan dengan aman dan damai.

“Meski berbeda dalam pilihan, jangan sampai kita dipecah belah, semua harus bersatu dan dewasa dalam menyambut pesta demokrasi nanti. Semua harus sepakat ya,” tandasnya.



Ramai-Ramai Bangun Tanggul Darurat

Lahan pertanian garam di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, sering kali mengalami banjir rob akibat kerusakan tanggul. Para warga sudah lama mengeluhkan kondisi tersebut.

Hal itu pun mendapat tanggapan oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon. Jumat, 11 Agustus 2023, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi, S.T, M.Si bersama Polresta Cirebon dan sejumlah unsur Forkompimda, menginisiasi pembuatan tanggul darurat untuk mencegah banjir rob kembali terjadi.

Luthfi menyampaikan, pembuatan tanggul daru-

rat merupakan upaya cepat mencegah rob yang sering mengancam tambak garam warga sehingga berimbas turunnya hasil produksi garam. Ia pun mengapresiasi langkah Polresta Cirebon yang memberikan 10 ribu karung untuk digunakan pembuatan tanggul.

“Secara prinsip harus segera ditangani dan kami sangat apresiasi Polresta Cirebon dan seluruh pihak, dalam penanganan sementara dampak rob berupa pembuatan tanggul darurat,” ujarnya.

Tanggul darurat tentu bersifat sementara, dan dalam waktu dekat akan didatangkan beko amphibi untuk membuat tanggul permanen. •mir



Mohon Awasi Galian Tambang



Sebuah video beredar di sosial media berisi tayangan longsornya pertambangan batu dan tanah di Gunung Kuda Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang. Dalam video tersebut, tampak sejumlah sopir truk bergegas membawa kendaraannya menjauh. Diketahui, kejadian longsor tersebut, diakibatkan penambangan under cutting, atau pemotongan dari bawah.

Pengelola tambang sendiri mengaku terpaksa menambang dari bawah, lantaran medan di lokasi tambang tidak memungkinkan untuk dilakukan dari atas. Selain itu, aktivitas penambangan dari atas memerlukan izin. Itu artinya, ada prosedur yang diabaikan.

Saya kira, mestinya jika tidak memungkinkan ditambang, pengelola wajib menghentikan aktivitas tambang karena mengancam keselamatan. Saya berharap DPRD dapat mengawasi setiap galian C agar tidak mengabaikan faktor keselamatan, terimakasih.

(Ginajar/Mahasiswa/Beberan)

Danau Ciperna Jadi Tempat Mesum

Assalamu'alaikum wr wb.

Danau yang berada di kawasan Royal Golf Ciperna merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Desa Ciperna dan sekitarnya. Selain gratis, tempat ini menyuguhkan panorama asri yang membuat pengunjung betah.

Namun di balik keindahan ini, tempat tersebut sering kali digunakan oleh oknum remaja dan pelajar untuk berbuat tak senonoh. Dan ini tentu mengganggu kenyamanan pengunjung.

Amat disayangkan, destinasi wisata lokal yang hampir penuh setiap akhir pekan tersebut justru dinodai. Saya harap, ini harus menjadi perhatian bersama, tak terkecuali Bapak/Ibu DPRD Kabupaten Cirebon. Perlu upaya tegas untuk menindak dan mencegah, guna memastikan kenyamanan pengunjung.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Didin/Karyawan/Wanasaba)



Warga Keluhkan Angka Kemiskinan Meningkat



Salam hormat bapak/ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Semoga senantiasa diberi kemudahan dalam mengemban amanah.

Sebelumnya perkenalkan, saya Ilyas (33), asal Desa Lemahtamba, Kecamatan Panguragan. Saya ingin mengeluhkan jumlah angka Kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang masih cukup tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon tahun 2021, jumlah penduduk miskin tercatat 271 ribu jiwa. Bahkan BPS Jawa Barat melaporkan Kabupaten Cirebon tergolong daerah termiskin ke-3 di Jawa Barat

Jika dilihat, jumlah tersebut memang lebih rendah bila dibandingkan saat pandemi covid-19. Namun bukan berarti, upaya untuk terus mengurangi angka kemiskinan tidak dilakukan.

Perlu langkah nyata Pemkab Cirebon agar mengurangi angka kemiskinan melalui program konkret. Bukan sebaliknya, membiarkan ini terus terjadi dan berlarut.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Ilyas/Guru/Lemahtamba)

Alat Rekam E-KTP Rusak

Dengan berat hati saya sampaikan, bahwa alat perekaman e-KTP di Kecamatan Lemahabang yang sudah berbulan-bulan tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Hal itu pun berdampak pada terganggunya layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi ribuan masyarakat.

Meski sempat diganti pada tahun lalu, namun perekam e-KTP diakui kembali rusak. Saya harap DPRD Kabupaten Cirebon dapat mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk segera menindaklanjuti masalah tersebut. Terlebih kita akan menyambut pesta demokrasi, di mana para pemilih pemula diharuskan memiliki e-KTP sebagai syarat memiliki hak suara.

Mohon ini harus jadi perhatian serius.

(Fadli/Wiraswasta/Wangkelang)





Raden Chaidir Susilaningrat
Pegiat Komunitas Kendi Pertula

Efek Domino Wisata Berbasis Budaya



Bicara Cirebon, tak lepas dari kisah masa lalu seorang tokoh yang mampu membawa Cirebon menjadi satu negara tersendiri.

Ialah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang membawa kelahiran Cirebon se-

bagai sebuah *nagari* (negara) merdeka dari Kerajaan Pajajaran dan menandakan peradaban baru di Nusantara. Pusat jalur perdagangan pelabuhan Muara Jati adalah jantung keluar masuknya ragam etnis, suku dan agama sehingga terciptanya akulturasi

budaya.

Tak ayal, seiring perjalanannya, Cirebon menjadi satu suku tersendiri. Bukan Jawa, bukan pula Sunda. Namun Suku Cirebon. Maka ragam kebudayaan dan kultur masyarakat Cirebon pun tercipta.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau kulture dapat diartikan pikiran, akal budi, hasil. Sedangkan membudayakan, berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya.

Sementara menurut bahasa Sanskerta kata kebudayaan berasal dari kata 'budha' yang berarti akal, kemudian menjadi kata budhi atau bhudaya. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Pendapat lain mengatakan bahwa budaya berasal dari kata budi dan daya.

Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya adalah perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar

Budaya Cirebon memiliki karakter yang khas dan sangat berbeda dengan budaya Sunda. Ini bisa dilihat dari jenis kesenian, watak masyarakat, makanan maupun bahasa sebagai keunikan paling pokok. Akulturasi menciptakan kekayaan dalam khazanah kebudayaan Cirebon. Di sinilah identitas budaya tercipta dan perlu dikembangkan.

Sampai saat ini, bukti peninggalan peradaban di Cirebon sangatlah banyak. Contohnya, masih ada keraton yang hidup dan berkembang seperti Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan.

Selain itu, ada ragam tradisi seperti, mudun lemah, sedekah bumi, nadran, *ngapem* dan *ngunjung buyut*. Hebatnya sebagian budaya tersebut, telah berekspansi di seluruh wilayah sekitarnya, terutama Ciayumajakuning.

Hal itu menandakan bahwa kultur atau budaya Cirebon telah berpengaruh dan menjadi *value* tersendiri. Maka bicara pelestarian budaya, adalah upaya merawat, meruwat nilai yang terkandung dari seluruh peninggalan kebudayaan Cirebon.

Nilai budaya yang dipertahankan merupakan jati diri bangsa atau jati diri Cirebon. Maka penulis menilai, budaya semestinya juga memiliki efek domino bagi kemajuan sektor lain: kesehatan, pariwisata, ekonomi, pendidikan.

Sudah banyak pengamat yang melihat, bila potensi daerah Cirebon adalah wisata berbasis budaya. Artinya budaya yang telah berlangsung lama sangat dinikmati oleh banyak orang dan sangat mungkin

terkonversi menjadi wisata.

Misalnya wisatawan yang ingin melihat bangunan kuno, maka akan memilih pergi ke keraton, Gua Sunyaragi; wisatawan peminat seni maka akan tertarik melihat tari topeng, wayang cepak, brai; wisatawan religi maka akan tertarik mengunjungi situs-situs; wisatawan pelancong maka tertarik di pariwisata.

Hal itu tentu perlu integrasi daerah sekitar Cirebon agar keberadaan potensi Cirebon baik kota dan kabupaten memiliki nilai jual yang muaranya adalah peningkatan ekonomi. Maka ketika budaya itu dikembangkan dan dilestarikan, efek yang dicari adalah efek peningkatan ekonomi masyarakat.

Bila itu dapat terwujud, maka potensi budaya yang besar akan berdampak pada seluruh sektor: UMKM batik, makanan khas Cirebon, situs-situs, oleh-oleh, wisata bahkan para pedagang kaki lima pun akan merasakan dampaknya.

Penulis menilai, implementasi pelestarian budaya Cirebon, dirasa belum optimal. Padahal hal itu sudah terkandung dalam visi-misi Bupati Cirebon.

Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon perlu berinovasi membuat integrasi budaya tersebut. Sejauh ini kehadiran budaya baru dianggap sebagai pelengkap *event* atau kegiatan tertentu yang belum terasa secara menyeluruh.

Pemajuan budaya harus menjadi target prioritas untuk melahirkan efek domino oleh seluruh elemen: pemerintah, masyarakat, buruh, pelaku ekonomi, akademisi dan para pegiat budaya. Semua harus mengambil peran agar keberadaan budaya Cirebon tidak hanya sebatas simbol atas glorifikasi sejarah.

Namun harus mampu menciptakan iklim kemajuan daerah. Bagaimana mengaturnya, menatanya menjadi suguhan menarik bagi para pecinta (wisatawan).

Penulis melihat, seluruh kecamatan di Kabupaten Cirebon terdapat satu keunikan khusus. Misalnya, para perajin gerabah, pegiat seni tari topeng, pembuat wayang, burok. Itu merupakan deretan budaya-budaya Cirebon.

Potensi kesenian, situs religi, adat istiadat, batik hingga kuliner merupakan magnet yang seharusnya dirasakan sebagai satu ekosistem wisata. Terlebih, Cirebon tak pernah sepi dari pelancong mancanegara.

Bila Pemerintah Kabupaten Cirebon tak segera membuat formula khusus maka jangan salahkan bila orang luar yang akan mengambil perannya. Dan salah satu upayanya, perlunya payung hukum turunan dari Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan. Agar efek domino dari budaya Cirebon benar-benar terasa.

Pengrajin Barongsai Tak Pernah Sepi Pemesan

Umur bukanlah penghalang untuk terus berkarya. Melihat potensi kesenian Barongsai masih sangat digemari dan bernilai ekonomi, membuat Nur (41) terpikat menjadi pengrajin Barongsai.

Meski perayaan tahun baru Imlek masih jauh, bukan berarti Nur tak dapat pesanan. Hampir tiap malam, Nur bersama teman sejawatnya berduyun-duyun membuat Barongsai dengan memanfaatkan bola dan busa. Dalam sehari, mereka mampu menghasilkan 20-40 buah.

Nur merasa bersyukur, belakangan ini banyak sekali pesanan masuk dari berbagai daerah di Indonesia. Ia kerap kali mengirim hasil kerajinannya ke beberapa kota hingga ke luar pulau Jawa. "Setiap kali pesanan itu bisa ngirim 5-7 kodi dalam seminggu," ujar Nur.

Bila mendekati tahun baru Imlek, pesanan Nur semakin membludak. Ia bisa menerima pesanan ratusan Barongsai. "Untuk satu Barongsai kita jual Rp 25 ribu, alhamdulillah selalu ada pesanan," katanya.



Hermawan, M.Pd

Sabet Juara Adiwiyata dan Inisiasi Aplikasi Absensi

Di tangan Hermawan, perubahan yang signifikan terjadi di SMP N 1 Mundu. Salah satunya keberhasilannya menyabet gelar Adiwiyata. Bagaimana bisa?

Puluhan tahun sosok satu ini menjadi guru di SMP Negeri 2 Gunungjati. Asam garam pun telah Hermawan rasakan. Kurang lebih 29 tahun Hermawan harus mengabdikan diri.

Selama itu pula, pria yang hobi bermain badminton itu mengemban amanah sebagai ketua musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

"Saya pernah menjadi Ketua MGMP dari tahun 2016-2021. Kami pernah membuat buku pelajaran IPA untuk kelas 7 kurikulum tahun 2013, bekerjasama dengan penerbit Arya Duta," ungkap Hermawan.

Berkat pengabdian dan ketekunannya, di tahun 2021, Hermawan diangkat sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Mundu.

Semenjak menjabat kepala sekolah, banyak perubahan yang telah dilakukan Hermawan. Di antaranya, selain gencar membangun fisik sekolah, Hermawan mengubah karakter warga sekolah untuk bersikap disiplin.

Salah satu kedisiplinan warga sekolah yang dilakukan, adalah masuk tepat waktu sesuai jam yang ditentukan serta mendorong pembuatan laporan kegiatan belajar mengajar (KBM).

"Jadi setelah saya diamanahi kepala sekolah, saya pacu para guru dan seluruh warga sekolah ini untuk bersikap disiplin. Setiap hari sebelum jam 7 pagi, para guru kita minta sudah berada di dalam kelas. Tidak boleh ada keterlambatan kecuali ada halangan tertentu. Jadi gak ada namanya kelas kosong gak ada guru," jelas Hermawan.

Hermawan bahkan membuat terobosan dalam menciptakan iklim pendidikan yang baik, dengan menciptakan sebuah aplikasi absensi guru berbasis android. Agar para guru tepat masuk sekolah sesuai jam yang ditetapkan.

"Dengan aplikasi itu, para guru juga bisa kita li-



hat perkembangan mereka. Jadi tidak perlu saya lihat langsung guru itu masuk atau tidak. Karena bisa kita cek langsung dari aplikasi. Kita juga bisa mengevaluasi dan melihat langsung laporan KBM," ungkapnya.

Selain itu, dengan aplikasi tersebut, secara tidak langsung para guru mulai melek teknologi. Bagi guru yang telat atau melanggar, Hermawan akan melakukan pembinaan agar tidak mengulanginya.

"Awal-awal pasti ada yang melanggar, cuma hal seperti ini faktor kebiasaan saja. Saya yakin dalam jangka panjang hal ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya jadi budaya," terang Hermawan.

Di sisi lain, Hermawan juga memberlakukan warga sekolah untuk berbudaya bersih menja-

ga lingkungan sekolah sehingga membuat nyaman proses KBM.

Tak heran karena kebersihan-nya, SMP N 1 Mundu sempat mendapat gelar Sekolah Adiwiyata pada tahun 2022 tingkat Kabupaten Cirebon.

"Selain menyabet gelar Sekolah Adiwiyata, dalam cabang olahraga futsal kami juga mendapat juara 1 dan juara 2 cabang olahraga karate tingkat kabupaten," jelas pria kelahiran 1969 tersebut.

Hermawan juga berinovasi dengan mewajibkan para guru membuat komik pembelajaran dari rangkuman semua mata pelajaran yang nantinya dikumpulkan menjadi 1 buku. "Upaya tersebut dilakukan agar para guru dapat berkreasi, berinovasi dalam mengajar," jelas Hermawan.

Alasan Hermawan membuat perubahan dari berbagai sudut, karena merujuk pada profil Pelajar Pancasila yang menyelenggarakan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif. "Selain itu, tujuan saya membuat perubahan untuk meningkatkan profesionalitas para guru dalam mengajar," ucap Hermawan.

Meski demikian, menciptakan budaya baru tidaklah mudah. Menurut Hermawan, perlu konsistensi memberlakukan peraturan tersebut sehingga warga sekolah menjadi terbiasa untuk menjalankannya.

"Alhamdulillah, sekarang semua warga sekolah sudah terbiasa dengan peraturan yang sudah ditetapkan karena sudah menjadi budaya," pungkas Hermawan. •Din

Yeni Suryani Karyawati

Kaya Prestasi, Jadi Kepsek Penggerak

Berkat Yeni, SMP N 1 Kedawung terpilih sebagai sekolah penggerak. Hampir sekolah yang disinggahi Yeni, tak lepas dari torehan prestasi. Bagaimana kisahnya?

Manis pahit telah Yeni alami. Asam garam menjadi pendidik bak melekat dalam dirinya. Yeni bercerita perjalanannya menjadi guru dimulai pada 1998 silam. Saat itu ia mengajar di SMP N 1 Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

Tak butuh lama, selang setahun, Yeni diangkat sebagai wakil kepala sekolah. Uniknya, jabatan tersebut ia emban hingga belasan tahun. "Kurang lebih 17 tahun saya menjabat wakepsek dan tidak pernah diganti. Silih berganti kepala sekolah saya masih dipercaya wakepsek," ungkapnya menceritakan.

Barulah di tahun 2015, pemilik nama lengkap Yeni Suryani Karyawati itu dipindah tugaskan ke SMP N 1 Klagenan dan pertama kalinya ia diamanahi untuk menjadi kepala sekolah. Dua tahun setelahnya, ia beralih memimpin SMP N 4 Palimanan. Tahun 2019 Yeni kembali dipindahkan dalam jabatan yang sama di SMP N 1 Talun.

Di sekolah tersebut, Yeni mengatakan, berbagai prestasi pun ditoreh. Di antaranya penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat karena kebersihan lingkungannya, baik tingkat kabupaten hingga nasional. "Tak hanya itu, kami juga pernah juara satu pada kejuaraan BKPSDM Awards," ujarnya.

Melalui berbagai kebijakannya, perempuan kelahiran 1968 tersebut menerangkan, civitas SMP N 1 Talun telah menunjukkan perubahan secara signifikan. Hasilnya SMP N 1 Talun mendapat kepercayaan luar biasa dari masyarakat.

"SMP N 1 Talun kan dulunya banyak selentingan sekolah yang suka tawuran dan sebagainya, semenjak sering mendapat penghargaan, warga



setempat mulai mendaftarkan anak-anaknya lagi," jelas Yeni.

Selepas meningkatkan prestasi SMP N 1 Talun, Di tahun 2020, Yeni diberikan amanah kembali untuk mengomandoi SMP N 1 Kedawung .

Seperti diketahui, SMP Negeri 1 Kedawung adalah salah satu favorit di Kabupaten Cirebon. Secara kelembagaan termasuk SMP negeri tertua yang didirikan sejak masa awal kemerdekaan. Dan sempat beberapa kali berubah nama menyesuaikan dengan kepindahan lokasi gedung dan perubahan wilayah kecamatan. Sejak 2010 ditetapkan sebagai Sekolah Berstandar Nasional (SSN).

Pertama kali didirikan pada 1958 bernama SMP Negeri III Cirebon menempati eks gedung SGB II (Sekolah Guru Bantu) di jalan Tuparev No. 14 Cirebon. Pada 1997, sekolah tersebut bernama SMP Negeri 3 Cirebon dan mengalami tukar guling ke Jalan Cideng Jaya No 299 Desa Kertawinangun, Ke-

camatan Kedawung Kabupaten.

Sejak 2001 berubah nama menjadi SMP Negeri 1 Cirebon Barat, seiring diberlakukannya otonomi daerah, pengelolaan sekolah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada 2005 berubah nama lagi menjadi SMP Negeri 1 Kedawung menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur kecamatan setelah diadakan pemekaran wilayah Kecamatan Cirebon Barat menjadi Kecamatan Kedawung.

Yeni menjelaskan, SMP N 1 Kedawung menjadi salah satu Sekolah Penggerak dari 8 sekolah penggerak lainnya di Kabupaten Cirebon.

"Sekolah penggerak adalah sekolah yang mendapatkan pendampingan tentang SDM-nya. Maksudnya baik kepala sekolah maupun gurunya mendapatkan pendampingan dari kementerian pendidikan untuk peningkatan mutunya," jelasnya.

Sebelum menjadi sekolah penggerak, Yeni lebih dahulu

terpilih sebagai kepala sekolah penggerak. Sehingga SMP N 1 Kedawung dapat menoreh Sekolah Penggerak. Dari 35 ribu kepala sekolah di seluruh Indonesia, hanya 3.500 yang berhak mendapatkannya.

"Itu termasuk saya, alhamdulillah menjadi kepala sekolah penggerak. Nah kalau kepala sekolah penggerak itu maka sekolah yang dipimpinnya menjadi sekolah penggerak," ungkap perempuan yang sedang menempuh pendidikan S3 di UI BBC tersebut.

Bagi Yeni, pencapaian tersebut tidak terlepas dari nikmat Allah Swt dan ketekunannya selama memimpin sebuah lembaga maupun organisasi. Seperti diketahui, saat ini Yeni tengah menjabat sebagai Bendahara Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Cirebon.

"Sekarang saya juga menjadi Ketua Perempuan PGRI. Saya senang berorganisasi karena mendapat pengalaman dan ilmu," pungkas Yeni. •Din

Gali Kebijakan Anggaran Komisi Informasi

Komisi Informasi Kota Cirebon menyebut bila anggaran komisi informasi disesuaikan dengan kebijakan SKPD dan kemampuan APBD.



Juli 2023 lalu, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menerima audiensi Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon. Mereka meminta agar anggaran KID di tahun 2024 dapat ditingkatkan.

Seperti diketahui, dalam rancangan APBD 2024, KID dianggarkan senilai Rp 500 juta. Namun angka tersebut dinilai belum sesuai harapan. Mereka pun membandingkan dengan kabupaten lain, di mana KID mendapat kucuran dana mencapai miliar.

“Kalau di Kabupaten Sumenep, anggaran KID sudah Rp 1 miliar lebih. Bahkan di Kota Cirebon yang dekat saja Rp 1,6 miliar. Sementara Kabupaten Cirebon yang menaungi 40 kecamatan hanya Rp 500 juta. Itu masih belum bisa mengcover. Karena 60 persen saja sudah digunakan gaji komisioner,” ujar Mohamad Idrus, ketua KID Kabupaten Cirebon saat audiensi dengan Komisi I.

Menindaklanjuti tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon guna mengkaji kebijakan anggaran.

“Pada rapat dengar pendapat dengan KID, mereka sering menyinggung kalau Komisi Informasi Kota Cirebon mendapat anggaran yang besar dibanding Kabupaten Cirebon,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan ST.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon H Junaedi ST pun menambahkan, KID meminta agar anggaran mereka bisa sama dengan Komisi Informasi Kota Cirebon. Ia pun tak menampik, jika Kabupaten Cirebon memiliki wilayah lebih luas dari Kota Cirebon, sehingga beban kerja KID tentu lebih berat. Namun Junaedi mempertanyakan landasan atau payung hukum sebagai bahan argumentasi.



“Kami belum tahu apakah ada standar penilaian kearah sana dari Pemerintah Pusat untuk menentukan anggaran seperti SKPD,” kata Junaedi.

Menanggapi itu, Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon Adi Arifudin SH menjelaskan, bila kebijakan anggaran untuk komisi informasi dikembalikan pada kebijakan dan kemampuan daerah. Sejauh ini, KI Kota Cirebon mendapat anggaran Rp 1 miliar pada 2023 dan 2024 nanti, sebagaimana usulan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Cirebon.

“Namun untuk di tahun 2025, anggaran kami direncanakan tidak lagi menginduk dinas, namun akan menggunakan dana hibah. Jadi kalau sesuai arahan Komisi Informasi Pusat penentuan anggaran itu tidak ada, jadi diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan APBD,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Hj Diah Irwany Indriyati, mempertanyakan upaya KI Kota Cirebon dalam menjalankan fungsinya menyampaikan keterbukaan informasi publik mau-

pun penyelesaian sengketa.

Komisioner Bidang Kelembagaan KI Kota Cirebon Ekky Bahtiar SE menyampaikan, dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Kota Cirebon beberapa kali mengadakan kunjungan atau visitasi ke Badan Publik yang ada di Kota Cirebon.

Tugas KI antara lain menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi yang diajukan setiap pemohon informasi publik.

Namun, Sampai dengan saat ini, Ekky mengungkapkan belum ada pengajuan sengketa informasi yang disampaikan masyarakat.

Hal itu pun dibenarkan Adi Arifudin. Menurutnya, hingga kini belum ada pengajuan sengketa dari masyarakat Kota Cirebon, namun justru datang dari luar Kota Cirebon.

Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Lutfiyah Handayani menambahkan, setiap bulan akan ada rekap dari kanal setiap SKPD dan badan publik mengenai permohonan informasi maupun sengketa.

“Ada tahapan sehingga sengketa itu tidak perlu langsung ke KI tetapi sudah ada kanalnya,” ungkapnya.

Sementara bila ada informasi yang harus disebarluaskan Pemerintah Pusat maka KI yang akan langsung menyebarkan kepada seluruh SKPD.

Komisi I pun mengapresiasi KI Kota Cirebon atas kunker tersebut. “Kita ucapkan terima kasih atas segala *sharing*. Ini akan jadi bahan bagi KID Kabupaten Cirebon termasuk anggaran yang perlu disiapkan,” pungkas Sofwan. •Suf

Komisi II: Pemkab Harus Optimalkan PAD Sektor BUMD

Hasan menilai, pendapatan sektor BUMD belum optimal. Perlu langkah nyata Pemkab untuk tingkatkan PAD BUMD.



Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Raden Hasan Basori menyesalkan, ketidak hadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai ketiga kalinya saat rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Padahal rapat tersebut menjadi sangat penting mengenai rencana peningkatan PAD. Hasan mengungkapkan, PAD Kabupaten Cirebon saat ini baru mencapai Rp 750 miliar.

"Tapi Sekda sudah tiga kali tidak hadir. Padahal rapat ini penting karena kaitannya dengan kebijakan dan regulasi," ungkap Hasan.

Hasan menilai pembiayaan APBD pemerintah

daerah belum mandiri. Oleh karenanya, dibutuhkan langkah untuk meningkatkan perolehan PAD. Salah satunya dengan mengoptimalkan BUMD antara lain: Bank Kabupaten Cirebon (BKC), Bank Cirebon Jabar (BCJ).

Komisi II menilai, PAD sektor BUMD masih sangat minim. Padahal potensi BUMD sebagai lumbung pendapatan daerah sangat besar.

"Rapat tadi sudah dihadiri bagian ekonomi, DPMD, Bappelitbangda, BKC, BCJ dan bagian hukum. Salah satu poinnya adalah menaikkan deviden dari perbankan, dari lima item yakni, Dana Desa, ADD, TPP, Siltap dan hibah bansos," jelasnya.

Pria yang diakrab disapa Kang Hasan itu menerangkan, poin bahasan dalam rapat adalah

bagaimana menaikkan PAD dari BUMD perbankan seperti BKC dan BCJ.

"BKC itu sahamnya 100 persen milik Pemda, sedangkan BCJ sharing saham dan sharing profit dengan pemprov. Untuk BKC sendiri, deviden yang dihasilkan per Juli 2023 ini sudah Rp 8 miliar," terangnya.

Oleh karenanya, Komisi II berpendapat, deviden perbankan bisa dioptimalkan dengan menasar segmen di jasa keuangan, sharing atau membantu sumber dana simpanan atau dana kredit yang tidak bertentangan dengan regulasi.

Hasan menegaskan, Komisi II berkomitmen untuk mendorong peningkatan PAD BUMD. Sejauh ini BUMD yang sudah berjalan antara lain sektor perbankan dan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Ia pun melihat, Pemerintah Kabupaten Cirebon belum mendukung penuh permodalan BUMD. Dukungan berupa modal usaha untuk BKC, BJC dan PDAM Tirtajati tak sepenuhnya direalisasikan sesuai aturan.

"Dalam Perbup itu, Bank BKC sebagaimana beberapa data



yang saya baca seharusnya diberi penyertaan modal Rp 50 miliar, tapi pemerintah baru memberikan Rp 30 miliar. Jadi akses permodalan ini jadi penyebab juga," jelasnya.

Bila melihat segmen pasar, Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk 2,3 juta, tentu sangat potensial. Andai saja 60 persen total penduduk misalnya

didorong untuk mengakses BKC atau BJC, maka pendapatan akan meningkat. Dan itu yang seharusnya menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Agar potensi perbankan bisa optimalkan.

Di sisi lain, BKC, BJC harus berani menawarkan akses permodalan atau partnership kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat. "Sehingga BKC dan BCJ bisa bersaing dengan bank swasta atau bank lainnya," kata pria asli Greged tersebut.

Sementara BUMD PDAM, juga tak kalah potensial sebagai sektor pendapatan daerah. Terlebih dengan kehadiran program Sustainable Development Goals (SDGs) yang mengharuskan masyarakat mengakses air bersih. Meski demikian, politisi PKB itu melihat, kondisi PDAM saat ini memprihatinkan.

"Infrastruktur PDAM masih aset lama, sehingga sering kali terjadi kebocoran. Ini yang harus jadi PR bersama," tandasnya. •Suf



Komisi IV Ingatkan Dinkes Segera Distribusi Antropometri

Meski Dinkes menyatakan proyek antropometri akan didistribusikan di akhir September 2023, Aan menilai, ketersediaan barang dan merk belum jelas.



Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon. Hal itu untuk mendengar jawaban menyangkut proyek pengadaan antropometri yang memakan anggaran senilai Rp 22 miliar. Diketahui, pemenang proyek antropometri pun telah dipilih pada akhir Mei 2023 lalu.

Selain menghadirkan Dinkes, Komisi IV juga mengundang bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau LPSE, dan Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan mempertanyakan proyek pengadaan antropometri sebuah rangkaian alat yang berfungsi mendeteksi stunting anak melalui pengukuran berat

badan, panjang dan tinggi tubuh, karena pemenang tender dan tanda tangan kontrak telah dilakukan.

Aan mengatakan, RDP ini bertujuan untuk mengetahui proses pengadaan antropometri. Agar bila terjadi kejanggalan, Inspektorat akan menindaklanjutinya.

"Tadi kita dengar tanggal 24 Mei sudah ditentukan pemenang tendernya. Pertanyaannya, apakah ada kunjungan ke pihak pemenang tender ini atau tidak? Jawabannya sedikit ngambang. Ditanya pabriknya di mana sedikit ragu-ragu," kata Aan.

Meski Dinkes sudah menyatakan proyek antropometri sudah dilakukan, Aan menyoal ketersediaan barang dan merknya yang belum jelas.

"Kita akan tindaklanjuti dengan teman-teman Komisi IV dengan berkunjung ke sana langsung

ke pabriknya, biar tahu juga," jelasnya.

Aan pun menyesalkan karena Dinkes tidak memberikan jawaban secara pasti kapan antropometri akan dibagikan ke seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Cirebon.

"Artinya itu barang sudah mulai dikerjakan, tapi juga kita tidak tahu kapan ini akan dibagikan ke puskesmas," ujar Aan.

Selepas rapat kerja, Aan menjelaskan, bila pengadaan proyek antropometri memang dilakukan seluruh Indonesia. Namun ia khawatir bila tender proyek dikolektifkan di salah satu pabrik tertentu dan tentu bisa saja kehabisan stok. Jika demikian, tentu Kabupaten Cirebon bisa terlambat. Padahal tenggat waktunya hingga 20 September 2023 sebagaimana disampaikan Dinkes dalam dokumen kontrak.

Sementara mengenai adanya pelanggaran pengadaan antropometri, kata Aan, sejauh ini tidak ada sebagaimana disampaikan Bagian ULP. Dalam arti masih sesuai aturan. Namun ia menyesalkan Dinkes semestinya mengecek langsung ke perusahaan pemenang tender.

"Iya seharusnya pada saat sudah klik, harusnya teman-teman dinkes langsung kontrol, apakah stoknya ada. Walaupun kita tahu itu wilayahnya Kemenkes, tapi minimal Dinkes ini bica cek barang juga," kata Aan.

Sebagaimana diketahui, Dinkes Kabupaten Cirebon pengadaan antropometri sebanyak 2.200 paket untuk Kabupaten Cirebon. Aan pun mengingatkan bila hingga 20 September 2023 nanti stok barang belum juga tersedia, tentu merugikan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Politisi PDIP itu menjelaskan, alat antropometri sangat



dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui berat badan bayi. Selain itu juga untuk mengecek apakah bayi stunting atau tidak. Pemeriksaan antropometri pada anak biasanya dilakukan untuk menilai status kesehatan secara umum, kecukupan gizi, serta pola pertumbuhan dan perkem-

bangsan anak.

"Kalau barangnya tidak didistribusikan sampai batas akhir, ya harus diberi sanksi teman-teman dinkes. Berarti sudah enggak benar. Karena antropometri ini sangat dibutuhkan. Kita tunggu saja nanti sampai September," tandas Aan. •Suf

Komisi III: Segera Selesaikan Pembangunan Alun-Alun Pataraksa

Pembangunan Taman Pataraksa tahap 2 mulai dikebut. Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon ingatkan pelaksana tak lagi molor. Seperti apa?



Pembangunan Alun-alun Taman Pataraksa (ATP) yang berlokasi di depan kantor Bupati Cirebon saat ini memasuki tahap *finishing*. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana menjelaskan, pembangunan ATP ditargetkan rampung pada Oktober 2023 mendatang. Ia pun terus memonitoring agar proyek pembangunan taman tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Seperti diketahui, Taman Pataraksa dicanangkan akan menjadi magnet rekreasi bagi masyarakat, serta bertujuan melindungi keberlanjutan lingkungan. Pembangunan taman sendiri, menjadi semakin relevan mengingat tantangan urbanisasi dan degradasi lingkungan yang semakin meningkat. Karena itu, Anton mengingatkan, agar pembangunan ATP dapat diakselerasi setelah sempat terhenti.

Politisi Golkar itu menuturkan, target pemba-

ngunan ATP harus jelas dan memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Salah satu kuncinya memiliki target spesifik dan terukur. Tanpa target yang jelas, sulit untuk menilai sejauh mana kemajuan telah dicapai dan apakah proyek bergerak ke arah yang benar.

Dirinya menegaskan, pembangunan taman yang terletak di jantung ibu kota Kabupaten Cirebon tersebut tidak lagi molor, karena akan sangat berdampak pada reputasi dan kepercayaan masyarakat.

"Apalagi itu akan menjadi ikon dan berada tepat di depan kantor bupati dan DPRD. Jangan sampai pembangunan alun-alun mangkrak. Makanya kita minta untuk segera selesaikan sebelum akhir tahun," tegasnya.

Anton berharap, keberadaan Taman Alun-alun Pataraksa akan dirasakan oleh masyarakat serta



menjadi wahana alternatif bagi para pengunjung.

"Harapan proyek selesai bisa bermanfaat buat masyarakat, dan menjadi keindahan tersendiri di Kota Sumber," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan menyebut, progres pembangunan Alun-alun Taman Pataraksa saat ini baru mencapai 30 persen. Namun, ia memastikan bila pengerjaannya akan selesai pada Oktober mendatang.

Menurut Iwan, pekerjaan-

pekerjaan pada tahap kedua ini bersifat arsitektur, bukan konstruksi. "Memang saya akui ada sedikit bias, tapi kemarin ada penjelasan dari pelaksana dan kami beri target dalam dua minggu ini, pelaksana bisa mengejar target yang kita tetapkan," ujar Iwan.

Saat evaluasi dengan pelaksana, DLH meminta dalam dua pekan ini agar ada peningkatan pekerjaan, baik dari jumlah tenaga kerja maupun material-material yang harus disediakan.

"Pokoknya, Oktober harus

selesai, karena kalau tidak selesai Oktober kita tidak ada waktu lagi untuk menyelesaikan ini, karena ini tahap terakhir bantuan dari provinsi," jelasnya.

Sementara dari sisi anggaran, Pemerintah Kabupaten Cirebon dikabarkan telah menerima bantuan senilai Rp 5 miliar dari Pemprov Jawa Barat untuk pembangunan tahap 2 Taman Pataraksa.

"Tahun ini akan ada pembangunan lanjutan untuk ATP dan Pemda mendapatkan sumbangan dari provinsi untuk penyelesaian tahap 2. Kami juga sudah membahas banyak hal dengan Komisi III," ujar Iwan,

Besaran anggaran yang diterima dari Pemprov Jabar sudah sesuai dengan perhitungan yang dibutuhkan untuk merampungkan pembangunan taman tahap kedua.

"Artinya, tidak perlu lagi dukungan dari anggaran APBD Kabupaten Cirebon. Secara hitungan itu sudah cukup dari anggaran provinsi," ungkap Iwan.

Anggaran Rp 5 miliar tersebut, dipastikan akan menyelesaikan pembangunan proyek ATP yang masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah.

"Seperti ketersediaan gerbang, galeri dan pekerjaan arsitektur lainnya sebagai sarana penunjang. Saat ini prosesnya sedang dalam tahap administrasi untuk melaksanakan pelelangan pekerjaan," terang Iwan.

Iwan berharap, pembangunan taman akan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Kalau sudah selesai, Kabupaten Cirebon akan memiliki taman yang cukup memadai bagi para pengunjung. Bisa juga untuk membuat Kota Sumber lebih ramai saat malam hari dan tentu akan jadi opsi bagi warga di akhir pekan," tandasnya. •Mir

Situs Keraton Gebang Butuh Sentuhan Agar Tak Ditinggal Wisatawan

Keberadaan Keraton Gebang diakui tak pernah sepi pasca rutusnya gelaran haul Pangeran Sutajaya. Butuh sentuhan untuk pengembangan?



Peninggalan sejarah penyebaran Islam di Cirebon tak terlepas dari keberadaan keraton. Di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon misalnya, terdapat sebuah situs Keraton Gebang atau yang biasa dikenal masyarakat setempat Elang Gajah.

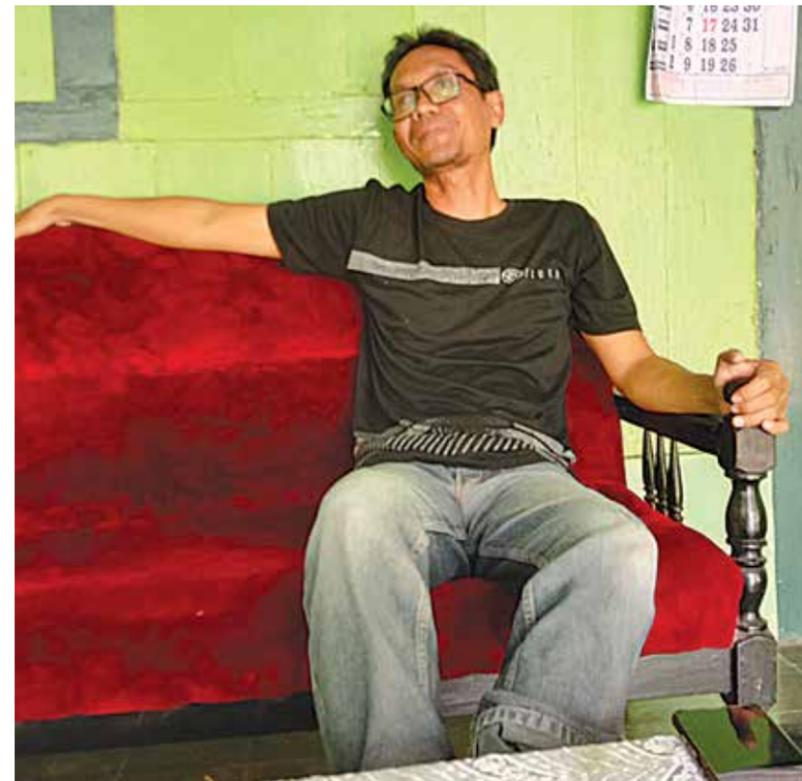
Sebagaimana hasil literatur, pendiri Keraton Gebang adalah Pangeran Sutajaya yang diperkirakan hidup pada abad 17 Masehi. Situs makam Pangeran Sutajaya pun berada dekat dengan keraton yang tak pernah sepi peziarah.

Meski demikian, keberadaan keraton dan makam dinilai belum terawat secara menyeluruh. Melihat itu, Pemerintah Desa Gebang Kulon mulai berbenah diri untuk mengembangkan situs ikonik

tersebut. Kuwu Desa Gebang Kulon Andi Subandi mengatakan, salah satu potensi yang akan dan tengah dikembangkan desa ialah situs Makam Pangeran Sutajaya dan Keraton Gebang.

Sejak tujuh tahun belakangan, situs Keraton Gebang mulai diperhatikan dengan adanya haul Pangeran Sutajaya Gebang dan Pangeran Pengantin. Melalui wadah Forum Komunikasi Warga Sutajaya Gebang (FKWSG), gelaran festival budaya sejarah Keraton Gebang kembali diangkat oleh masyarakat Gebang Cirebon melalui tradisi haul.

Acara haul Pangeran Sutajaya dilaksanakan di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang yang biasa dihadiri kerabat Keraton Kanoman, Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon, Muspika



Gebang, serta melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Para warga dan masyarakat Gebang pun merespon baik pasca rutusnya gelaran haul Pangeran Sutajaya. "Tiap tahun akhirnya ramai, para penjual di sini juga bisa senang. Karena sangat berdampak pada ekonomi warga sekitar. Dan yang paling penting kita semua bisa ngaji sejarah Gebang ini sendiri, berikut sosok Pangeran Sutajaya," ujar Ihsanuddin, salah satu warga sekitar.

Acara haul tersebut, biasanya diisi dengan arak-arakan yang dihadiri Pangeran Patih dari Keraton Kanoman. Pangeran Patih akan diarak menggunakan kendaraan Paksi Nagaliman diikuti para pengawal yang berkostum layaknya zaman kesultanan. Pawai tersebut akan berakhir dengan kegiatan tahlil bersama di makam

Pangeran Sutajaya.

Tradisi budaya ini menjadi ajang untuk menarik wisatawan baik lokal maupun dari luar Cirebon. Salah satu trah Kesultanan Cirebon Elang Solehudin menerangkan, bila keberadaan situs Keraton Gebang sarat akan sejarah penyebaran Islam di Cirebon sehingga perlunya perawatan.

Dulunya, Haul Pangeran Sutajaya ini hanya dilaksanakan oleh keluarga dan kerabat Pangeran Sutajaya atau Elang Gebang saja. Melihat potensi wisata sejarah yang ada di dalamnya, maka salah satu warga FKWSG menginisiasi agar haul ini bisa melibatkan seluruh warga Gebang. "Dan alhamdulillah sekarang sudah melibatkan seluruh warga di desa-desa se Kecamatan Gebang. Melalui acara tersebut, warga Gebang bisa terus menjaga sejarah, silsilah

dari Pangeran Sutajaya," ungkap Elang Solehudin.

Bak gayung bersambut, tradisi haul Pangeran Sutajaya di Situs Keraton didukung penuh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Penetapan tradisi haul ini biasa dilakukan pada bulan Maulid.

Dampak kegiatan haul tersebut, saat ini perawatan Situs Pangeran Sutajaya dan Keraton Gebang Krapyak mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Solehudin yang juga mewakili FKWSG berharap, keberadaan keraton Gebang dapat menjadi simbol potensi wisata religi bagi masyarakat Cirebon timur. Bila itu terwujud, maka akan ada dampak positif bagi ekonomi warga sekitar.

Sejauh ini keberadaan keraton, tak absen dari wisatawan dari berbagai daerah. "Kedatangan wisatawan tujuannya macam-macam. Ada yang berkepentingan untuk studi, kajian, rutinan, riset atau hanya sekadar berwisata melihat bangunan dan peninggalan zaman dulu," ungkap Solehudin.

Oleh karenanya, FKWSG pun berencana mengembangkan wisata situs Keraton Gebang dan situs Pangeran Sutajaya.

Meski demikian, FKWSG belum mampu merealisasikannya karena tidak adanya biaya untuk perizinan. "Karena memang ada tanah dari pemilik rumah dekat situs ini yang merupakan hak waris atas lahan tersebut. Itu yang masih menjadi kendala. Kita berharap kedepan Pemkab Cirebon bisa membantu pembenahan, perawatan dan pengembangan situs ini," harapnya. •Soy

Guwa Kidul

Pelayanan Cepat Berkat Website

Segala informasi dan pelayanan di Desa Guwa Kidul cukup diakses melalui website, setelah Pemdes Guwa Kidul meluncurkan program digitalisasi desa. Seperti apa?



Pemerintah Desa (Pemdes) Guwa Kidul, Kecamatan Kaliwedi, patut berbangga setelah berhasil mewujudkan pelayanan warga berbasis digital. Tidak sedikit, masyarakat Desa Guwa Kidul yang mengakui pelayanan desa dianggap cepat.

Sejak tiga tahun lalu, Pemdes Guwa Kidul meluncurkan *website* guna menunjang informasi dan kebutuhan masyarakat.

Kuwu Desa Guwa Kidul Ade Firdaus mengatakan, desa harus bisa berkembang mengikuti zaman yang semakin cepat. Tak terkecuali dalam pelayanan.

“Website ini saya sendiri yang buat sejak tahun 2019 lalu. Saya rasa setiap desa punya kewajiban untuk berkembang mengikuti zaman,” kata Ade.

Di dalam website terdapat banyak fitur. Mulai dari statistik desa, peta lokasi desa, pengaduan warga dan informasi seputar kegiatan di Desa Guwa Kidul.

“Masyarakat juga merasa puas dengan pelayanan cepat website. Bahkan banyak juga yang membandingkan dengan pelayanan desa sebelah,” ungkap Ade.

Selain itu, website juga menyediakan data kependudu-

kan, sehingga bukan hal sulit bagi Pemdes Guwa Kidul saat mencari data warga.

Semula, pada awal digitalisasi pelayanan, tidak sedikit perangkat desa yang mengeluh kesulitan. Namun, seiring waktu akhirnya terbiasa dan terbantu dengan adanya website tersebut.

“Awalnya banyak perangkat desa yang terbebani karena ada website itu, mungkin karena masa percobaan. Tapi sekarang mereka malah senang karena merasa dimudahkan,” jelasnya Ade.

Bahkan saat ini, Ade mengaku telah membantu pembuatan website untuk beberapa desa. Sekitar 13 desa di 3 kecamatan telah ia dorong agar memiliki website pelayanan.

“Dulu membuat website itu harganya Rp 35 juta, saya kasihan jadi saya bantu beberapa kuwu yang saya kenal untuk membuat website desa,” ungkap Ade.

Ade mengatakan, apa yang dilakukannya karena ia ingin desa-desa bisa maju. Sehingga ia merasa bangga karena Desa Guwa Kidul dapat menjadi contoh untuk desa-desa lain.

“Karena kebetulan saya sukali ilmu teknologi (IT) sejak remaja. Jadi minimalnya pengetahuan saya bisa membantu Desa Guwa Kidul agar berkembang,” katananya. •Par

Mundumesigit

Mulai Benahi Situs Syekh Ki Lobama

Meski tak sepi pengunjung, keberadaan situs makam Syekh Ki Lobama dinilai belum layak. Pemdes targetkan pembenahan di tahun depan. Seperti apa?

Bila berkunjung ke Desa Mundumesigit, Kecamatan Mundu, terdapat situs Syekh Ki Lobama yang tak pernah sepi peziarah. Terlebih, saat bulan maulid, ratusan peziarah dari berbagai kota akan ramai-ramai memadati makam.

Meski demikian, kondisi situs Syekh Ki Lobama belum tertata rapi. Tak adanya kawasan parkir maupun area khusus ziarah.

Melihat itu, Pemerintah Desa Mundumesigit mulai bersicepat membenah.

Di tahun 2024, Pemdes Mundumesigit akan merevitalisasi kawasan parkir di area situs, agar kendaraan peziarah aman.

“Karena selama ini di situs tersebut belum ada tempat parkir. Nanti kita akan musyawarah desa dulu untuk membahas anggaran dan sebagainya,” ujar Kuwu Desa Mundumesigit Syarifuddin.

Pembenahan tersebut, diperkirakan akan memakan waktu cukup lama dan membutuhkan anggaran yang besar.

Syarifuddin mengungkapkan, tujuan pembenahan tersebut juga diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Terlebih, Desa Mundumesigit belum memiliki pendapatan dari hasil usaha.

“Nanti kita akan buat wa-



rung-warung dikelola Bumdes, dan sebagian dikelola oleh warga setempat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bumdes Mundumesigit sempat memiliki program bank sampah, namun belum berjalan optimal.

“Masyarakat mengumpulkannya sendiri lalu dijual sendiri. Sistem pembayaran dikalkulasikan setiap sebulan sekali. Cuma. Sekarang tidak berjalan,” jelas Syarifuddin.

Ia pun berharap, agar Pemerintah Kabupaten Cirebon menepati janjinya mengenai pembangunan jalan menuju situs Syekh Ki Lobama. Bila jalan sudah dibuatkan, tentu kendaraan peziarah bisa masuk ke area situs.

“Kalau sekarang kendaraan peziarah hanya bisa parkir di lokasi yang jauh dari situs. Pemkab sudah janji akan bantu buat jalan, kita masih menunggu realisasinya,” tandasnya. •Din

Setu Wetan

Aktif Kembangkan Industri Rumahan

Ratna mengatakan, izin dan sertifikat usaha akan mempermudah para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yang berbasis segmen tertentu.



Bila berkunjung ke Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon tersimpan segudang potensi UMKM. Terdapat berbagai macam jenis industri rumahan milik warga. Mulai dari kudapan, pangan, perdagangan hingga kerajinan tangan.

Namun, kepemilikan usaha tersebut, ditengarai belum semua dipayungi legalitas perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, maupun sertifikat pangan industri rumah

tangga (PIRT).

Melihat itu, Pemerintah Desa Setu Wetan, saat ini tengah aktif menyosialisasikan guna mendorong para pelaku usaha segera memiliki izin dan sertifikat usaha.

Kuwu Desa Setu Wetan Ratnawati mengatakan, NIB diperlukan karena berfungsi sebagai identitas resmi yang mengidentifikasi dan mengenali badan usaha atau usaha perseorangan. Selain itu, NIB digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan legal dalam menjalankan kegiatan usaha.

Perempuan yang akrab disapa Ang Nok itu, merasa prihatin melihat banyaknya pelaku usaha yang belum mengantongi izin sehingga berdampak terdapat siklus usaha yang mereka jalankan. Pun tak jarang, dirinya mendapati pelaku usaha yang akhirnya gulung tikar karena ketidakmampuan beradaptasi terhadap realitas dan permintaan pasar.

“Sebagai pemerintah desa, tentu kami ingin agar masyarakat yang mayoritas pelaku industri rumahan dapat mengembangkan bisnis dengan mekanisme perizinan,” ujar Ratna.

Ratna mengungkapkan, perlunya izin dan sertifikat usaha bagi para pelaku industri rumahan dimaksudkan agar mereka dapat menjangkau segmen tertentu, sehingga bisnisnya dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan.

Ia juga menjelaskan, penyuluhan dan sosialisasi dimaksudkan untuk mendorong investasi baik skala lokal, daerah atau nasional.

Dirinya berharap, upaya meningkatkan kepemilikan izin dan sertifikat usaha tersebut, dapat direspon baik oleh masyarakat. “Khususnya para pelaku usaha. Karena dengan begitu, segmentasi pasar dan ekspansi bisnis mudah daicapai,” jelasnya. •Mir

Asem

Kebut Perbaiki Jalan Desa

Setelah dua tahun rusak, Pemdes Asem pun telah memperbaiki kerusakan jalan desa. Tahun depan, jalan semua bakal mulus.

Kerusakan jalan di Desa Asem, Kecamatan Lemahabang, sudah lama dikeluhkan warga sekitar. Terlihat lubang-lubang menganga di setiap jalan blok. Hal itu pun ditengarai karena dana desa yang belum dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan pasca pandemi.

Keresahan warga pun terjawab pada Juni 2023 lalu. Pemerintah Desa Asem mulai memperbaiki jalan desa setelah menggelar musyawarah desa.

“Sudah dua tahun lalu rusak karena saat itu pandemi juga. Baru tahun ini akhirnya bisa kita perbaiki,” ujar Kuwu Desa Asem Ade Faturrochman.

Ade menjelaskan, perbaikan jalan sepanjang 600 meter dengan lebar 2.5 meter memakan anggaran sebesar Rp 125 juta dari dana desa. Sementara durasi pengerjaannya memakan waktu 5 hari.

Pembangunan jalan dilakukan di Blok Pahing, Puhun dan Blok Wage. Selain jalan, Pemdes Asem juga membangun jembatan desa.

“Jalan rusak dan jembatan itu sudah diharapkan warga sejak lama. Dan alhamdulillah perbaikan jalan selesai kurang seminggu. Warga pun menjadi senang, karena jalan sudah enak dilalui,” jelasnya.



Meski demikian, Ade mengungkapkan, belum semua jalan blok perbaikan. Masih ada tiga blok: Kliwon, Manis, dan Puhun.

Ade pun menargetkan perbaikan jalan sepanjang 2,5 kilometer tersebut akan diperbaiki di tahun mendatang. “Sekarang kami akan musyawarah desa terlebih dahulu November nanti. Kita berharap dapat direalisasikan di tahun 2024,” jelas pria lulusan sarjana hukum tersebut.

Di sisi lain, Pemdes Asem juga terus menggali potensi desa

demokratik meningkatkan pendapatan asli desa. Sejauh ini mereka baru memiliki unit usaha penjualan gas LPG melalui badan usaha milik desa.

Sebagian sektor yang akan digenjut adalah wisata religi makam Kiai Ismail maupun Situs Pamuruyan.

“Di situs Pamuruyan itu banyak mitosnya. Di situ mata airnya tidak pernah kering dan digunakan warga untuk mencuci dan sangat berguna saat musim kemarau. Itu yang akan kita gali kedepan,” pungkas Ade. •Din

Mohamad Luthfi



Glagepan

Jika Bahasa Cirebon punah apakah kamu rela? Pertanyaan itu beberapa kali saya lontarkan ke beberapa orang dengan usia yang berbeda. Tentu saja jawabannya beragam. Namun, ada satu yang menarik, dengan berbalik bertanya: *emang* bahasa bisa punah?

Tentu saja bisa. Catatan Kemendikbud ada 11 bahasa daerah yang sudah punah, enam berstatus kritis (penuturnya berusia 40 tahun ke atas), dan 25 bahasa daerah terancam punah (jumlah penutur berusia 20 tahun ke atas hanya sedikit).

Idealnya, seiring dengan perkembangan populasi manusia dan teknologi informasi, Bahasa harusnya berkembang. Perkembangan bahasa salah satunya bisa dilihat dari penambahan jumlah kosa kata dari tahun ke tahun.

Pada 1953 jumlah kosakata Bahasa Indonesia hanya 23 ribu. Kini, sesuai data dari laman KBBI, sudah mencapai 120.375 kosakata. Jumlah ini jika dibandingkan dengan bahasa lain termasuk sedikit. Bahasa Inggris sudah mencapai 1,1 juta kosakata, dan Bahasa Arab 12,3 juta kosakata.

Nyatanya, menurut catatan Kemendikbud di atas bahasa daerah mengalami penurunan. Lantas apakah yang menjadi penyebab kemunduran bahasa daerah? Beberapa penelitian menunjukkan faktor kemunduran bahasa daerah antara lain karena adanya persepsi bahwa bahasa daerah itu simbol keterbelakangan, kemiskinan, dan dianggap tidak Gaul.

Bagaimana dengan Bahasa Cirebon? Tak jauh beda. Pertanyaan yang lebih penting adalah adakah upaya untuk melestarikan Bahasa Cirebon? Minimal ada tiga elemen penting untuk pengembangan bahasa daerah: Lembaga Bahasa, pendidikan formal dan kegiatan pendukung, serta kamus bahasa daerah.

Lembaga Bahasa jelas belum ada. Pendidikan formal belum mendukung sepenuhnya. Ada beberapa daerah yang kesehariannya berpenutur Bahasa Cirebon justru muatan lokal pelajaran di sekolahnya bahasa daerah lain. Tidak masalah sebenarnya, asal Bahasa Cirebon juga diajarkan.

Nah, bagaimana dengan kamus? Coba jawab *sing teges, aja gremung*: Jika engkau orang Cirebon, pernahkah membaca kamus Bahasa Cirebon? Lah kok malah *glagepan*. Santai saja, tarik nafas dulu. Kalau jawabannya 'belum pernah', Anda tidak sendirian. Banyak manusia Cirebon lainnya yang belum pernah menyentuh, bahkan melihat barang langka itu.

Ada juga yang *ngeles*: *Kita kan wong Cerbon asli Kang, ora perlu kamus*. Betul, tapi kamus adalah alat ukur bahwa bahasa (kosakata) berkembang, sekaligus alat penjaga dari kepunahan. Kamus Bahasa Cirebon-Indonesia tercatat pernah diterbitkan pada 1992 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kenapa Bahasa Cirebon tidak boleh punah? Kalau kita bicara mengenai penguatan budaya, maka bahasa adalah fondasi budaya sebuah daerah. Bahasa adalah komponen budaya yang sangat penting dan kompleks. Bahasa mencerminkan cara pandang (*worldview*), nilai-nilai, tradisi, dan identitas budaya suatu masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa ada 10 objek pemajuan kebudayaan (OPK), yakni Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Ritus, dan Bahasa.

Pemerintah Kabupaten Cirebon Bersama DPRD kini sedang menggodok Perda tentang pemajuan kebudayaan. Perda ini, idealnya mengatur upaya strategis semua pemangku kepentingan tentang 10 OPK tersebut, terutama penguatan fondasi budaya: bahasa daerah.

Lembaga Bahasa harus didirikan. Lembaga ini punya tugas untuk mengembangkan Bahasa Cirebon, termasuk di dalamnya secara berkala memperbaharui kamus Bahasa Cirebon. Lembaga ini juga punya peran strategis mensinergikan lembaga pendidikan formal untuk meningkatkan minat generasi muda menggunakan Bahasa Cirebon.

Harapannya, tak ada lagi manusia Cirebon yang *glagepan* budaya, terutama berbahasa Cirebon.



SEKRETARIS DPRD
DAN SELURUH PEGAGAWI

DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

**DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA**



**TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU**